

**RENJA
TAHUN 2019**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini sudah melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan disana sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Akhirnya, semoga memberikan manfaat.

Marabahan, Juli 2018



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

H. Suren Nor, SKM.M.Kes

NIP. 195905011981031018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	34
2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	77
2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan	77
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	79
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	79
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	80
3.3. Program dan Kegiatan	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	104
4.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Kesehatan	105
BAB V PENUTUP	150
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	150
5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	150
5.3. Rencana Tindak Lanjut	151

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sera Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang RPJPD tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.